

**TESIS**

**KEPASTIAN BAGIAN WARISAN UNTUK AHLI WARIS NON  
MUSLIM DALAM AKTA NOTARIS**



**Disusun Oleh :  
YOSE CANDRADINATA  
NIM. 12213056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2016**

**TESIS**

**KEPASTIAN BAGIAN WARISAN UNTUK AHLI WARIS NON  
MUSLIM DALAM AKTA NOTARIS**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :  
YOSE CANDRADINATA  
NIM. 12213056  
PRO PATRIA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2016**

## RINGKASAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Jika notaris melalaikan ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik, maka akta tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja. Atas pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian notaris tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan. Dan apabila Notaris tersebut mengetahui bahwa isi akta tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai syarat sahnya perjanjian maka ia wajib menjelaskan hal tersebut dan memberikan pendapat hukumnya supaya akta itu bersifat adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Hak yang diperoleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah dapat diberikan apabila ahli waris terhalang mewarisi karena mawani, seperti perbedaan agama atau karena terhibab oleh ahli waris yang lain. *Wasiat wajibah* dapat diperuntukkan atau dapat berlaku kepada saudara kandung yang non muslim, dan jumlah harta yang dikeluarkan lewat wasiat wajibah untuk saudara kandung non muslim ini adalah sama dengan bagian saudara kandung muslim yang sederajat, dengan ketentuan tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta peninggalan.

## ABSTRAK

Adanya penghalang tidak saling mewarisi menurut hukum waris islam diantaranya adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat saling mewarisi dalam hukum kewarisan sesuai dengan muatan hadist memang sudah tidak bisa dirubah lagi, akan tetapi tentunya dalam perkembangan selanjutnya ketika realitas sosio kultural telah berbeda dengan masa pada saat hadist itu diturunkan hendaknya dibedakan dengan pembunuhan atau fitnah yang terbukti atau diakui oleh pelakunya yang secara universal diakui dengan kejahatan terhadap manusia, sehingga apabila pelakunya dihukum tidak dapat mewarisi pewarisnya yang dibunuh, dianiaya, atau difitnah, maka tidak akan ada yang mengkritisi bahwa hukum Islam tidak adil. Perbedaan agama bukanlah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi menyangkut keyakinan akan kebenaran ajaran suatu agama yang patut dihargai dan dihormati oleh siapapun sebagaimana Islam telah mengajarkan demikian. Oleh sebab itu, apabila ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim tidak mendapatkan bagian, maka hukum Islam akan dianggap sebagai hukum yang tidak adil. Disebutkan didalam Al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 180, yang artinya kalau seseorang tidak berwasiat maka kaum kerabat yang tinggal wajib untuk mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta warisan, yang mereka anggap layak untuk kaum kerabat yang tidak berhak mewarisi. wasiat dalam hukum kewarisan adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat mewarisi karena sebab terhalang mewarisi walaupun berbeda agama, apabila masuk Islam seorang kafir kemudian datang kepadanya kematian. Sementara kedua orang tuanya masih tetap kafir, maka kepadanya diharuskan untuk berwasiat untuk melunakkan hati kedua orang tuanya, sebagaimana perintah Allah swt untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun kedua-duanya tetap kafir. Dari uraian diatas jelaslah bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak bisa mewarisi disebabkan karena adanya salah satu penghalang, apakah karena perbudakan, beda agama atau terhalang oleh ahli waris lain, wajib diberi wasiat, apabila seorang muslim pada saat hidupnya tidak berwasiat.



## ABSTRACT

The existence of the barrier are not mutually inherit according to Islamic inheritance law are religious differences between the heir with the beneficiary. Religious differences as a deterrent for other inherited in accordance with the inheritance law charge Hadith has indeed not be changed anymore, but surely in the next when the reality of the socio cultural has been different with Moslems at a time when it should be distinguished by lowered murder or slander that is proven or recognized by the culprit that universally recognized with crimes against mankind, so that if the culprit was judged unable to inherit his successors being killed, persecuted, or vilified, then there will be no critiquing that Islamic law is not fair. Religious differences is not a crime against humanity but concerns the conviction of the truth of the teachings of a religion should be appreciated and respected by anyone as Islam has taught so. Therefore, if the heirs of a different religion with his successor that Muslims don't get the part, then Islamic law would be considered unjust laws. Mentioned in the Qur'an Surah al-Baqarah (2) paragraph 180, meaning that if a person does not make then relatives who lived to a certain number of issuing of inheritance, which they deem worthy to relatives who are not entitled to inherit the. Wills in inheritance law was specifically given to people who can not inherit because of different religion hindered inherited though, if a Gentile converted to Islam later came to her death. While his parents were still Pagan, then it is necessary to make him to soften the hearts of both parents, as well as the command of Allah swt to always do good to both parents even though they are both still heathen. From the explanation above it is clear that both parents and relatives who could not inherit due to the presence of one of the barrier, whether because of slavery, a different religion or eclipsed by other compulsory heirs, given the will, when a moslem at the time of his life do not make.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong atas keinginan penulis untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn), tidak lupa penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Kepastian Bagian Warisan Untuk Ahli Waris Non Muslim Dalam Akta Notaris**” hanya semata-mata karena ridho-Nya. Penulis menyadari berkat bantuan, dukungan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Habib Adjie, SH., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama;
2. Bapak Prof.Dr.Afdol,S.H.,M.S. Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
3. Kepada Orang Tua saya Ibu Ratri Harti, istri saya Anggawati, kakak saya Radina Lindawati, S.H., M.Kn. dan adik saya Siska Febiana, S.H., teman saya Ryan Kurniawan, dan kedua anak saya Yoga Candradinata dan Aldy Putra Candradinata yang

tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan doa sehingga selesainya tesis ini.;

4. Para Dosen Pengajar dan pihak Sekretariat yang telah memberikan perkuliahan dan informasi yang berguna dan bermanfaat dalam rangka persiapan tesis ini dari awal sampai akhir;
5. Rekan-rekan MKN VI di Universitas Narotama yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam hukum kewarisan Islam.

Surabaya,.

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Persyaratan Gelar .....	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi .....	iii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji .....	iv
Lembar Keaslian .....	v
Ringkasan .....	vi
Abstrak .....	vii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II      TANGGUNG JAWAB NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM.....</b>	<b>14</b>



A. Tugas dan Wewenang Notaris .....	14
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Akta Yang Dibuatnya.....	26
<b>BAB III    HAK AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>34</b>
A. Perkembangan Hukum Waris Islam Di Indonesia.....	35
B. Kedudukan Yurisprudensi Dalam Pembentukan Hukum.....	39
C. Perolehan Hak Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Islam .....	41
D. Wasiat Menurut Hukum Islam.....	48
E. Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam.....	63
F. Bagian Harta Warisan Terhadap Ahli waris Non Muslim.....	69
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
1. Kesimpulan .....	81
2. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Jika notaris melalaikan ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik, maka akta tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja. Atas pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian notaris tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap notaris yang bersangkutan. Dan apabila Notaris tersebut mengetahui bahwa isi akta tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak, mengenai syarat sahnya perjanjian maka ia wajib menjelaskan hal tersebut dan memberikan pendapat hukumnya supaya akta itu bersifat adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Atas tindakan yang dilakukan oleh notaris ini maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut notaris tersebut atas pelanggaran perbuatan melawan hukum, yaitu adanya klausula yang bersifat menguntungkan salah satu pihak saja tanpa adanya tindakan untuk melakukan penjelasan dari Notaris tersebut. Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris mendapat acuan dalam menjalankan

tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya.

2. Hak yang diperoleh ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat adalah merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Berwasiat bagi seorang muslim bukanlah suatu keharusan. Namun, Rasulullah SAW menganjurkan agar seseorang itu berwasiat yang baik, sebelum dirinya meninggal dunia. Wasiat wajibah dapat diberikan apabila ahli waris terhalang mewarisi karena mawani, seperti perbedaan agama atau karena terhibab oleh ahli waris yang lain. Kewajiban bagi seseorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada ibu dan bapak atau kaum kerabat lainnya dapat ditemukan ketentuannya dalam Quran Surat. *Al Baqarah ayat 180*. Wasiat wajibah dapat diperuntukkan atau dapat berlaku kepada saudara kandung yang non muslim, dan jumlah harta yang dikeluarkan lewat wasiat wajibah untuk saudara kandung non muslim ini adalah sama dengan bagian saudara kandung muslim yang sederajat, dengan ketentuan tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta peninggalan.

## B. Saran

1. Demi menjaga keluhuran dan martabat Notaris, diharapkan agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUN dan kode etik notaris. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada setiap penghadap yang meminta dibuatkan akta otentik. Diharapkan pula Notaris teliti, cermat dan tepat dalam teknik membuat akta dan penerapan aturan hukum yang tertuang dalam akta serta kemampuan menguasai keilmuan dibidang kenotarisan secara khusus dan hukum pada umumnya.
2. Perlunya dilakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam, yang mana perlu ditambahkannya halaman dalam KHI tentang wasiat wajibah kepada saudara non muslim. Karena disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim pengadilan agama harus berani menciptakan hukum baru, jika diketahui ada pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum dan kemaslahatan manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sukris Sarmadi, *"Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Abdurrahman, *"Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.
- Afdol, *"Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil"*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- Ahmad Bisyri Syakur, *"Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah & Wasiat"*, Visi Media Pustaka, 2015.
- Ahmad Rofiq, *"Hukum Islam Di Indonesia"*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- A. Kohar, *"Notaris Dalam Praktek Hukum"*, Alumni, Bandung, 1983
- Doddy Radjasa Waluyo, *"Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris"*, Media Notaris.
- Erik Sumarna, *"Wasiat Wajibah terhadap Saudara Kandung"*, IAIN Sumatera Utara, Medan, 2004.
- Fathurrahman, *"Ilmu Waris"*, Al-Ma'arif, Bandung, 1994.
- Henny Tanuwidjaja, *"Hukum Waris Islam Menurut BW"*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moh. Machfuddin Aladip, *"Terjemah Bulughul Maram Karya Agung Al Hafizh Ibn Al'Asqalani"*, PT. Karya Toha Putra, Semarang
- Hasballah Thaib, *"Ilmu Hukum Waris Islam"*, Medan, 2011

- M. Idris Ramulyo, *"Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi' Hazairin Dan Wasiyat Wajib Di Mesir"*, Jakarta, 1982.
- Mourik, M.J.A. Van., *"Civil Law and the Civil Law Notary in a Modern World"*, Media Notariat.
- Nico, *"Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum"*, Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law, Yogyakarta, 2003.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *"Pengantar Hukum Islam"*, Fakultas Hukum USU-UISU, Medan, 1987.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Suhrawardi K. Lubis, *"Hukum Waris Islam"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Suparman Usman, *"Fiqh Mawaris Hukum Islam"*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *"Peraturan Jabatan Notaris"*, Erlangga, Jakarta, 1992.